



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408827/2019**

Revisi ke 02
Tanggal : 27 Juni 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 3. Provinsi | : (12) | LAMPUNG |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408827) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG |
| Sebesar | : Rp. | 193.000.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06	Program Pembentukan Hukum	Rp.	193.000.000
013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Rp.	193.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	193.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN BANDAR LAMPUNG | (017) Rp. | 193.000.000 |
|------------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408827/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9854-5080-1842-7865

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408827) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Seprizal
Bendahara Pengeluaran : Arya Dwijayanti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Agung Budiyo

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			193.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			193.000.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum			193.000.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	4	RUU	
	02	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
	03	Persentase (%) perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80	%	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disusun sesuai dengan Perencanaan dan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)	4	RUU	
	02	Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan Sesuai dengan Permohonan	80	%	
	03	Persentase (%) Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi Sesuai Standar	80	%	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			193.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			
	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan			
	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan			
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	14 Raperda		125.450.000
Indikator Output Kegiatan	01	persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	677	raperda	
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	52 Orang		67.550.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	1052	Orang	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408827/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9854-5080-1842-7865

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408827) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408827	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	-	193.000	-	-	-	193.000		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	193.000	-	-	-	193.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	-	193.000	-	-	-	193.000		
5250.001	Fasilitas pembentukan produk hukum daerah	-	125.450	-	-	-	125.450	12.51	
01	RM	-	125.450	-	-	-	125.450	017	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	67.550	-	-	-	67.550	12.51	
01	RM	-	67.550	-	-	-	67.550	017	
JUMLAH		-	193.000	-	-	-	193.000		

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408827/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9854-5080-1842-7865

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (408827) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408827	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	14.544	28.090	13.670	9.020	0	21.442	20.863	20.620	20.083	20.843	23.825	193.000
		52 BELANJA BARANG	0	14.544	28.090	13.670	9.020	0	21.442	20.863	20.620	20.083	20.843	23.825	193.000
	013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	0	14.544	28.090	13.670	9.020	0	21.442	20.863	20.620	20.083	20.843	23.825	193.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	14.544	28.090	13.670	9.020	0	21.442	20.863	20.620	20.083	20.843	23.825	193.000

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408827/2019
IV A. B L O K I R**



DS:9854-5080-1842-7865

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [408827] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408827/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:9854-5080-1842-7865

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [408827] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001